

# Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Simpang Kubu Kandang

**Sumantri, Irfan Widyanto\***

Program Studi Manajemen Universitas Graha Karya Muara Bulian

\*Email: [irfanwidyanto123@gmail.com](mailto:irfanwidyanto123@gmail.com)

## Article history

Received: 9/6/2024

Revised: 28/6/2024

Accepted: 29/6/2024

Published: 29/6/2024

## **Abstrak**

Perkembangan otonomi daerah yang signifikan dalam meningkatkan standar ekonomi daerah dan mengarahkan masyarakat ke arah modernisasi. Perkembangan ini menghadirkan berbagai rekayasa sosial yang mempengaruhi implementasi hukum dalam konteks sosial nyata, sesuai dengan pandangan Roscou Pound bahwa hukum harus relevan dengan kehidupan sosial yang kompleks. Hal ini juga mengidentifikasi ketimpangan struktural dalam masyarakat, khususnya sentralisasi kekuatan ekonomi di kota-kota besar yang menyebabkan jurang antara kota dan pedesaan. Eksistensi desa sebagai poros utama pertanian penting untuk dimaksimalkan, dengan perluasan konsep otonomi daerah sebagai solusi untuk menyeimbangkan hubungan pusat-daerah yang sentralistik. Terakhir, penulis menyarankan perlunya penyuluhan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Batang Hari, serta upaya universitas dalam menyediakan informasi tentang pendirian, manfaat, dan tata kelola BUMDes guna mendukung pembangunan ekonomi desa secara merata.

**Kata kunci:** *Pendampingan, Pengelolaan, Bumdes, Otonomi Daerah, Pemerataan Ekonomi*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan otonomi daerah telah mengalami kemajuan signifikan terutama peningkatan standar ekonomi daerah yang mengarah ke modernisasi. Perkembangan tersebut memunculkan berbagai rekayasa sosial. Menurut Roscou Pound, Hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis yang terlampau eksklusif. Sebaliknya, hukum itu mesti didaratkan didunia nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling berkaitan.

Pada dasarnya, 'kondisi awal'struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurang imbang. Ada yang terlalu dominan, dan adapula yang terpinggirkan. Untuk menciptakan dunia yang beradap, ketimpangan struktural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional. Sentralisasi kekuatan ekonomi pada kota-kota besar mengakibatkan terjadinya laju urbanisasi dan sekaligus menciptakan jurang yang besar antara kemajuan kota dan kemiskinan masyarakat pedesaan. Padahal secara factual, eksistensi desa sebagai poros utama pertanian justru harus dimaksimalkan.

kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan

dan pemborosan. Konsep otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata ulang sistim struktur dalam masyarakat terutama ketimpangan yang ada antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik.

Mengingat pemerintahan desa yang saat ini khususnya dikabupaten Batang Hari masih awam dengan pemahaman akan aturan dan tata cara pendirian, manfaat, serta tata kelola Bumdes maka dipandang perlu pemberian penyuluhan atau wawasan tentang BUMDES. Kemudian mengingat permintaan pemerintah Desa yang demikian itu maka perguruan tinggi UGK MB dapat menyampaikan materi atas aturan dan tata cara pendirian, manfaat, serta tata kelola Bumdes.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode kegiatan ini meliputi metode workshop yaitu berupa pembukaan, pemaparan materi, pengenalan alat bahan, pembagian kelompok, pembuatan dan pengumpulan hasil ecoprint. Khalayak sasaran pengabdian masyarakat ini tentu saja adalah kepada masyarakat desa di lingkungan Kabupaten Batang Hari. Khalayak sasaran di utamakan kepada masyarakat desa dan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan Badan usaha Milik Desa.

Pelaksanaan Pengabdian ini tentu saja melibatkan beberapa pihak. Diantaranya: Masyarakat Desa, Pengurus Desa, dan organisasi-organisasi yang ada di Desa sebagai wadah diskusi untuk peningkatan kualitas. Oleh karena itu untuk kelancaran kegiatan pengabdian ini akan bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Masyarakat Desa dan organisasi-organisasi yang ada di desa. Melalui sosialisasi dan penyampai materi BUMDes ini diharapkan wawasan dan keterampilan pengembangan BUMDes dapat tercapai.

## HASIL KEGIATAN

Permasalahan bahwa Masyarakat desa yang ada di kabupaten Batang Harimasih kurang memahami tentang pengelolaan BUMDes, arti penting BUMDes, serta pentingnya peningkatan mutu serta kemampuan masyarakat dalam melaksanakan serta pengelolaan BUMDes, khususnya pelaporan administrasi dan pengelolaan keuangan hasil penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan menggunakan metode ceramah dengan teknik presentasi materi profesi dilanjutkan dengan diskusi, sedang masalah kemampuan mengembangkan. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk workshop.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan workshop. Kegiatan dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut: Langkah 1 : Peserta pelatihan diberikan materi mengenai BUMDes.. Langkah 2 : Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan. Langkah 3 : Peserta berlatih untuk menggambarkan peluang usaha yang akan dikembangkan atau dibuat. Langkah 4 : Peserta diberikan bimbingan pembuatan sistem administrasi dan jenis peluang usaha. Langkah 5 : Hasil diskusi dikumpulkan dan dianalisis untuk diberikan masukan dan saran.



Gambar 1: Dokumentasi Pelaksanaan

Beberapa permasalahan tidak berkembangnya BUMDes pada umumnya disebabkan oleh kondisi obyektif pedesaan yakni tingkat pemahaman pemerintahan desa terhadap aturan-aturan yang telah diterbitkan pemerintah, rendahnya produktivitas pelayanan di Desa selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumberdaya manusia dibidang manajemen, organisasi yang kurang profesional, penguasaan teknologi dan pemasaran yang lemah, serta rendahnya kualitas kewirausahaan dari para pelaku usaha mikro.

Masalah pengembangan BUMDes juga bertambah rumit karena kebanyakan usaha mikro kurang difasilitasi dengan akses terhadap permodalan, informasi, pasar, teknologi dan faktor-faktor penunjang bisnis lainnya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam bentuk *firmativeaction* atau tindakan keberpihakan, yakni bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memang harus mengembangkan BUMDes (www.kemendagri.com; 2011)

## KESIMPULAN

Ternyata Desa Simpang Kubu kandang belum mempunyai pemahaman yang kuat terhadap BUMDes dan belum melaksanakan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, sehingga terlaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat dari Perguruan Tinggi UGK MB, tentang penyampaian materi/ Workshof BUMDes. Diharapkan dari kegiatan pengabdian ini Bumdes Simpang Kubu Kandang memahami bagaimana pengelolaan Bumdes yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan menggunakan pemanfaatan teknologi serta melakukan inovasi-inovasi.

## REFERENSI

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010

Yunanto, (2014)<http://desamembangun.or.id/2014/04/strategipengembanganbumdessebagaipilarekonomidesa>

Aksa (2014) [http://desa\\_membangun.or.id/2014/04/strategi\\_pengembangan\\_bumdessebagaipilarekonomidesa](http://desa_membangun.or.id/2014/04/strategi_pengembangan_bumdessebagaipilarekonomidesa)

Soemarno, Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan KIMDES,

Umar, Husein. 2008. *Strategic Management in Action*. Kanisius. Yogyakarta.